

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Para akademisi telah mendorong pentingnya penelitian terhadap norma-norma yang berasal dari kawasan non-Barat. Penyebaran norma lintas batas negara, biasanya disebarkan oleh aktor yang dikenal dengan sebutan *norm entrepreneur*. *Norm entrepreneur* adalah aktor, baik individu, kelompok, maupun negara, yang berusaha mendorong perubahan norma yang berlaku di masyarakat atau dalam hubungan internasional.¹

Jeffrey Checkel dalam tinjauannya tahun 1998 berargumen bahwa ada kecenderungan akademisi konstruktivis yang terlalu fokus pada konstruksi sosial yang bersifat positif, seperti norma perdamaian dan kerja sama internasional. Menurutnya, pendekatan ini seharusnya tidak mengabaikan aspek negatif dalam politik global. Konflik, kekerasan, dan perang juga merupakan hasil konstruksi sosial yang perlu diperhatikan dalam kajian konstruktivis.²

Cowles mengkritik bahwa *norm entrepreneur* seringkali digambarkan sebagai aktor yang "secara etis baik" dan layak dihormati, karena dianggap mendorong perubahan yang positif.³ Brooks mengkritik akademisi dan advokat

¹ Annika Björkdahl, *From Idea to Norm: Promoting Conflict Prevention* (Lund: Department of Political Science, Lund University, 2002), 46.

² Jeffrey T. Checkel, "The Constructivist Turn in International Relations Theory," *World Politics*, 1998, accessed December 23, 2025, <http://ereserve.library.utah.edu/Annual/POLS/6850/Hampton/constructivist.pdf>.

³ Maria Cowles, "Non-State Actors and False Dichotomies: Reviewing IR/IPE Approaches to European Integration," *Journal of European Public Policy* 10, no. 1 (March 1, 2003): 102–120, <https://doi.org/10.1080/1350176032000046967>. dikutip dari Wunderlich, Carmen. *Rogue States as Norm Entrepreneurs: Black Sheep or Sheep in Wolves' Clothing?*, Hal. 44

HAM yang sering menyematkan istilah *norm entrepreneur* untuk menggambarkan tokoh seperti Gandhi, Nelson Mandela, dan Bunda Teresa, yang berhasil mengubah keyakinan banyak orang secara positif. Menurut Brooks, istilah ini tidak terbatas pada aktor-aktor tersebut saja, karena *conflict entrepreneur* (oportunis) juga dapat menyebarkan norma. Jika Mandela adalah seorang *norm entrepreneur*, Osama bin Laden, Slobodan Milosevic, dan bahkan Hitler juga dapat disebut demikian.⁴

Bettiza dan Dionigi juga memiliki pemahaman yang serupa dengan akademisi-akademisi diatas. Bettiza dan Dionigi mengatakan bahwa sebagian besar penelitian Hubungan Internasional saat ini hanya berfokus pada norma-norma yang dianggap "baik" serta pada aktor-aktor tertentu seperti *Non-Governmental Organization* (NGO) yang sering menganut nilai-nilai liberal Barat.⁵ Dunford turut memberikan pendapat mengenai masalah ini. Dunford menilai akademisi sering terlalu berfokus pada perspektif negara-negara Barat dan kelompok elit.⁶

Oleh karena itu, Carmen Wunderlich mengatakan bahwa dalam kajian mengenai norma saat ini, terdapat "*bias toward feel-good norm entrepreneurship*". Wunderlich menggunakan istilah *prototypical norm entrepreneur* untuk menyebut pemahaman dan aktor didalam kerangka liberal barat tersebut, dan menggambarkan *norm entrepreneurship* diluar kerangka itu sebagai *unconventional norm entrepreneur*.⁷ Bias dalam memahami konsep *norm entrepreneur* sering kali

⁴ Rosa Ehrenreich Brooks, "The New Imperialism: Violence, Norms and the Rule of Law," *Michigan Law Review* 101, no. 7 (June 2003): 2326–2327, <https://doi.org/10.2139/ssrn.478382>.

⁵ Gregorio Bettiza and Filippo Dionigi, *Beyond Constructivism's Liberal Bias: Islamic Norm Entrepreneurs in a Post-Secular World Society* (Fiesole, Italy: European University Institute, 2014).

⁶ Robin Dunford, "Peasant Activism and the Rise of Food Sovereignty: Decolonising and Democratizing Norm Diffusion?," *European Journal of International Relations* 23, no. 1 (July 24, 2016): 145–167, <https://doi.org/10.1177/1354066115614382>.

⁷ Carmen Wunderlich, *Rogue States as Norm Entrepreneurs: Black Sheep or Sheep in Wolves' Clothing?* (Cham, Switzerland: Springer, 2020).

membuat penelitian berfokus pada aktor yang dianggap membawa nilai moral universal.

Dalam hal ini, perlu untuk memahami bahwa tidak semua pihak yang menyebarkan norma melakukannya karena didasarkan pada nilai-nilai moral yang berlaku secara umum. Sebaliknya, ada juga kelompok yang menyebarkan norma berdasarkan ideologi sendiri, yang bisa jadi bertentangan dengan nilai-nilai yang dianggap umum atau universal di dunia. Dalam hal ini, salah satu kelompok yang dapat diambil contoh adalah Daesh.

Daesh adalah kelompok transnasional yang paling dimusuhi oleh komunitas internasional pada abad ke-21. Daesh, yang juga dikenal dengan nama IS, ISIS, atau ISIL adalah organisasi bersenjata non-negara Timur Tengah yang memiliki jaringan internasional.⁸ Tercatat 89 negara dan organisasi telah membentuk koalisi untuk melawan Daesh.⁹ Daesh memiliki visi untuk mendirikan sebuah Kekhalifahan yang diatur dengan hukum Islam yang ditegakkan dengan cara berjihad. Data dari *Washington Institute* menunjukkan bahwa dari tahun 2014 hingga Januari 2025 Daesh telah memiliki jaringan di 92 negara.¹⁰

Pada 29 Juni 2014, Abu Muhammad al-Adnani, juru bicara Daesh, mendeklarasikan berdirinya Kekhalifahan yang dipimpin oleh Abu Bakar al-

⁸ Kelompok yang umumnya disebut sebagai ISIS telah disebut dengan berbagai nama. Awalnya dikenal sebagai "Negara Islam di Irak dan Levant" (ISIL) atau "Negara Islam di Irak dan Suriah" (ISIS), memperpendek nama menjadi "Negara Islam" (IS atau ad-Dawla al-Islāmiyya) atau sering disingkat "Daesh" pada Juni 2014 ketika mendeklarasikan Kekhalifahan Islam.

⁹ U.S. Department of State, "Members – The Global Coalition To Defeat ISIS," *U.S. Department of State*, n.d., accessed May 29, 2025, <https://www.state.gov/the-global-coalition-to-defeat-isis-partners/>

¹⁰ Washington Institute, "The Islamic State Select Worldwide Activity Interactive Map" *The Islamic State* | *Washington Institute*, January 31, 2025, accessed February 2, 2025, <https://www.washingtoninstitute.org/islamicstateinteractivemap/#home>.

Baghdadi sebagai Khalifah di wilayah Irak dan Suriah. Tak lama setelah itu, pada November 2014, Daesh mengumumkan pembentukan berbagai provinsi (*wilayah*) di luar Irak dan Suriah. Provinsi-provinsi ini mencakup kawasan di Afrika, Kaukasia, serta Asia. Daesh menunjukkan ambisi yang besar untuk menanamkan pengaruh di berbagai belahan dunia.¹¹

Deklarasi ini memicu berbagai reaksi dalam komunitas internasional. Pada tahun 2015, Amerika Serikat memimpin operasi militer besar-besaran yang berhasil melemahkan kekuatan Daesh. Pada akhir tahun 2017, kelompok tersebut telah kehilangan 95% wilayah yang sebelumnya dikuasai. Akhirnya, Presiden Donald Trump mengumumkan kemenangan atas Daesh pada Desember 2018, menyatakan bahwa kelompok tersebut telah dikalahkan.¹²

Pukulan paling telak bagi Daesh terjadi pada Oktober 2019, ketika sang Khalifah, Abu Bakar al-Baghdadi, tewas dalam serangan pasukan Amerika Serikat. Meskipun sebagian besar kekuatannya telah runtuh, Daesh tetap menjadi ancaman global. Pada tahun 2023 Daesh dan afiliasinya masih aktif di 26 negara.¹³ Pada tahun 2025, Daesh dipimpin oleh sosok yang kurang dikenal, Abu Hafs al-Hashimi al-Qurashi. Al-Qurashi merupakan Khalifah keempat setelah al-Baghdadi mendeklarasikan diri sebagai Khalifah pertama pada tahun 2014.¹⁴

¹¹ Washington Institute, "The Islamic State Select Worldwide Activity Interactive Map".

¹² Mahmut Cengiz, Kutluer Karademir, and Huseyin Cinoglu, "The ISIS Model and Its Influence over Global Terrorism," *European Scientific Journal, ESJ* 18, no. 7 (February 28, 2022): 15–16, <https://doi.org/10.19044/esj.2022.v18n7p14>.

¹³ U.S. Department of State and Development Services Group, *Country Reports on Terrorism 2023* (East Bethesda, Maryland: U.S. Department of State, 2024).

¹⁴ Jacob Zenn, "Brief: New Islamic State Caliph Inherits Renewed Syrian Insurgency," *The Jamestown Foundation Global Research & Analysis*, August 21, 2023, accessed February 2, 2025, <https://jamestown.org/program/brief-new-islamic-state-caliph-inherits-renewed-syrian-insurgency/>.

Daesh, sebagai kelompok non-negara, terlihat dari jaringan yang luas telah memberikan pengaruh besar dalam upaya untuk menggoyahkan struktur dan tatanan normatif internasional. Meskipun metode yang digunakan, bertentangan dengan norma yang umum diterima secara global, Daesh telah memengaruhi wacana politik internasional. Dengan menantang norma-norma yang ada, Daesh telah mempromosikan bentuk pemerintahan dan ideologi berbasis Islam, yang mengubah cara beberapa pihak memandang tatanan dunia.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena kemunculan Daesh sebagai aktor non-negara yang mampu menyebarkan nilai dan membentuk persepsi dalam komunitas Muslim telah memunculkan tantangan baru dalam studi hubungan internasional. Meskipun tidak berasal dari lingkungan liberal dan tidak membawa nilai-nilai universal yang lazim dikaitkan dengan *norm entrepreneurship*, Daesh menunjukkan kapasitas untuk memengaruhi dinamika normatif di tingkat regional dan global. Untuk benar-benar memahami dinamika norma dan menghindari bias, tidak bisa hanya melihatnya dari sisi positif atau yang dianggap “baik” oleh sebagian orang. Perlu untuk melihat pandangan dari sisi lain yang dimiliki oleh kelompok-kelompok seperti Daesh, yang memiliki cara berpikir dan norma yang sangat berbeda dengan tatanan dunia liberal.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, dapat diformulasikan pertanyaan penelitian sebagai berikut, apakah Daesh bertindak sebagai *norm entrepreneur* dalam jenis tertentu terhadap komunitas Muslim dalam dinamika struktur internasional?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang konsep *norm entrepreneur* dengan memahami Daesh sebagai aktor non-negara yang menyebarkan norma di luar kerangka liberal yang dominan dalam studi Hubungan Internasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menyuguhkan analisis yang dapat membantu menjelaskan bagaimana Daesh membentuk narasi dan memengaruhi komunitas Muslim global dalam dinamika struktur internasional.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini memperluas pemahaman dalam studi hubungan internasional dengan menghadirkan perspektif baru tentang *norm entrepreneur* non-konvensional seperti Daesh, serta memperbaharui teori yang selama ini terpaku terhadap aktor liberal.
2. Secara praktis, penelitian ini membantu masyarakat dan pemerintah mengenali serta menangkal strategi ideologis dan narasi yang disebarkan Daesh, serta menjadi rujukan dalam kebijakan kontra-radikalisasi.

1.6 Studi Pustaka

Studi Pustaka bertujuan untuk mengumpulkan, menilai, dan menyatukan informasi dari berbagai sumber agar lebih memahami suatu topik. Proses ini juga dapat membantu untuk mengetahui penelitian yang sudah ada dan kekurangannya sehingga dapat ditemukan *gap* penelitian. Studi pustaka yang telah dilakukan pada berbagai literatur, digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

Carmen Wunderlich, dalam bukunya yang berjudul *Rogue States as Norm Entrepreneurs: Black Sheep or Sheep in Wolves' Clothing?* yang terbit pada tahun

2020, telah melakukan tinjauan kritis terhadap berbagai literatur mengenai norma.¹⁵ Untuk menghindari pengulangan kajian, penelitian ini akan merujuk pada analisis yang telah dilakukan oleh Wunderlich sebagai landasan dalam menelusuri penelitian-penelitian terdahulu. Namun demikian, peneliti tidak sekedar mengandalkan ulasan tersebut, melainkan juga melakukan verifikasi ulang terhadap hasil tinjauan kritis yang disajikan Wunderlich. Selain itu, peneliti turut memperkaya kajian ini dengan menambahkan ulasan dari literatur-literatur terbaru yang terbit setelah karya Wunderlich, sehingga penelitian ini tetap relevan dengan perkembangan terkini.

Karya Wunderlich ini, menjadi acuan utama peneliti dalam konsep *norm entrepreneur*. Literatur ini telah menjelaskan secara baik dan mendalam konseptualisasi *norm entrepreneur* dan menghubungkannya dengan studi ilmu Hubungan Internasional. Selain itu, Wunderlich juga turut memperkaya kajian ini dengan menambahkan konsep baru, dengan membagi jenis *norm entrepreneur* menjadi dua, yaitu *reformist norm entrepreneur* dan *revolutionary norm entrepreneur*.

Reformist norm entrepreneur berupaya memperbaiki norma yang ada secara bertahap tanpa mengubah kerangka dasar, biasanya bekerja sama dengan negara dan institusi untuk mencari solusi praktis. Sebaliknya, *revolutionary norm entrepreneur* ingin mengganti norma secara total dengan menciptakan kerangka baru yang menantang sistem lama, sering kali menggunakan pendekatan konfrontatif dan menekankan pentingnya perubahan besar. Perbedaan ini

¹⁵ Carmen Wunderlich. *Rogue States as Norm Entrepreneurs: Black Sheep or Sheep in Wolves' Clothing?*, Hal. 72-76.

membantu memahami *non prototypical norm entrepreneur* yang seringkali diabaikan dalam kajian ini.¹⁶

Penelitian mengenai *non-prototypical norm entrepreneur* sebenarnya telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Berbagai penelitian ini fokus pada aktor yang berperan dalam mempromosikan perubahan norma sosial meskipun tidak memenuhi karakteristik *norm entrepreneur* pada umumnya. Hasil penelitian tersebut memberikan wawasan baru dalam diskusi dan debat seputar kajian norma internasional.

Adamson mengamati bahwa upaya untuk mengubah norma-norma atau nilai-nilai di wilayah Asia Tengah pasca-Soviet dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu peluang dalam diskusi, lembaga, dan kondisi politik internasional. Adamson fokus pada dua kelompok yang berusaha mempengaruhi norma di wilayah tersebut. Satu kelompok adalah jaringan yang mendukung demokrasi, yang sebagian besar berasal dari negara-negara Barat, sementara kelompok lain adalah jaringan Islam yang ingin mempromosikan nilai-nilai Islam. Adamson berpendapat bahwa perhatian yang lebih besar diberikan kepada kelompok yang mendukung demokrasi Barat karena dominasi ide liberal di dunia global. Hal ini menyebabkan gagasan-gagasan yang berasal dari politik Islam seringkali terabaikan dan kurang mendapat perhatian.¹⁷

Bettiza dan Dionigi membahas tentang keberhasilan dan kegagalan upaya negara-negara non-Barat dalam mempengaruhi norma internasional. Bettiza dan

¹⁶ Carmen Wunderlich. *Rogue States as Norm Entrepreneurs: Black Sheep or Sheep in Wolves' Clothing?*, Hal. 267.

¹⁷ Carmen Wunderlich. *Rogue States as Norm Entrepreneurs: Black Sheep or Sheep in Wolves' Clothing?*, Hal. 72.

Dionigi fokus pada Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang berusaha mempromosikan dua hal di PBB, *dialogue of civilizations* dan larangan menghina agama. Bettiza dan Dionigi menyatakan bahwa keberhasilan upaya ini bergantung pada seberapa baik OKI bisa meringkaskan konsep-konsep Islam menjadi bahasa yang diterima dalam sistem sekuler-liberal PBB.¹⁸

Inisiatif *dialogue of civilizations*, sukses karena para pendukungnya tidak secara langsung menyebutkan Islam dalam kampanye tersebut. OKI menyampaikan ide-ide yang lebih umum, seperti perdamaian, kesetaraan, toleransi, dan HAM, yang sudah diterima di tingkat internasional. Namun, upaya OKI untuk melarang penistaan agama gagal karena dipandang melindungi Islam dari kritik, yang dianggap terlalu mengutamakan kepentingan agama tertentu. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai liberal yang lebih menekankan kebebasan berbicara dan hak individu.

Lynch menggunakan istilah *norm entrepreneur* untuk menggambarkan usaha Osama bin Laden dalam meyakinkan dunia Muslim bahwa identitas Islam radikal dan norma-norma yang diyakininya itu lebih unggul. Untuk mencapai tujuan ini, dia mengatakan bahwa al-Qaeda sengaja menggambarkan politik dunia sebagai "pertempuran antara peradaban", di mana ekstremisme agama bisa dibenarkan secara moral. Meskipun Lynch menyebut al-Qaeda sebagai *norm entrepreneur*, dia tidak benar-benar mengembangkan argumentasi ini lebih lanjut,

¹⁸ Carmen Wunderlich. *Rogue States as Norm Entrepreneurs: Black Sheep or Sheep in Wolves' Clothing?*, Hal. 72.

sehingga tidak ada penjelasan mendalam mengenai bagaimana bentuk *norm entrepreneur* al-Qaeda ini.¹⁹

Literatur karya Ali Elbenhawy, "*Hezbollah as a Norm Entrepreneur: Reconstructing Resistance and Legitimacy*," membahas peran Hezbollah dalam membentuk norma sosial dan politik di Timur Tengah. Literatur ini merupakan literatur pertama yang menjawab seruan daripada para akademisi untuk meneliti mengenai aktor *non-prototypical norm entrepreneur* bersenjata non-negara yang mempromosikan norma-norma diluar kerangka liberal barat. Literatur ini menunjukkan bagaimana Hezbollah merekonstruksi konsep perlawanan dan legitimasi di wilayah tersebut.²⁰

Hezbollah telah mengalami transformasi dari sebuah kelompok bersenjata menjadi aktor utama dalam politik dan masyarakat Lebanon, yang dikenal dengan proses "*Lebanonization*". Dalam perubahan ini, Hezbollah telah berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik Lebanon dan menyediakan berbagai layanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. Peran Hezbollah dalam bidang ini memungkinkan Hezbollah untuk mendapatkan dukungan masyarakat luas, sehingga perlawanan yang dilakukan kini dipandang sebagai bagian dari upaya pertahanan negara Lebanon. Transformasi ini menunjukkan keberhasilan Hezbollah dalam membangun norma sosial dan politik yang memungkinkan untuk berperan ganda sebagai aktor politik sekaligus kelompok bersenjata.²¹

¹⁹ Carmen Wunderlich. *Rogue States as Norm Entrepreneurs: Black Sheep or Sheep in Wolves' Clothing?*, Hal. 72.

²⁰ Ali Elbenhawy and Sean McMahon, "Hezbollah as a Norm Entrepreneur: Reconstructing Resistance and Legitimacy," *Hezbollah as a Norm Entrepreneur: Reconstructing Resistance and Legitimacy* (thesis, AUC Knowledge Fountain, 2016).

²¹ Ali Elbenhawy, *Hezbollah as a Norm Entrepreneur: Reconstructing Resistance and Legitimacy*.

Mengenai karya ilmiah yang membahas mengenai Daesh sebenarnya juga sudah banyak. Jasko, Kruglanski, Hassan, dan Gunaratna dalam *ISIS: Its History, Ideology, and Psychology* menjelaskan bahwa Daesh berkembang pesat setelah ketidakstabilan politik di Timur Tengah, terutama setelah invasi AS ke Irak pada 2003 dan pecahnya perang saudara di Suriah pada 2011. Organisasi ini memanfaatkan kekacauan untuk memperluas pengaruhnya dan mendeklarasikan Kekhalifahan pada 2014 di bawah kepemimpinan Abu Bakr al-Baghdadi.²²

Daesh menganut ideologi yang menginterpretasikan Islam secara radikal. Jasko dkk. menekankan bahwa kelompok ini memiliki pemahaman *takfiri*, sebuah konsep yang membenarkan pengkafiran dan pembunuhan terhadap pihak yang dianggap menyimpang dari ajaran Daesh. Daesh juga menggunakan propaganda berbasis agama untuk merekrut anggota dan membenarkan tindakan.

Jasko dkk. mengkaji faktor psikologis yang membuat individu bergabung dengan Daesh. Jasko dkk. menemukan bahwa ideologi radikal dikombinasikan dengan faktor sosial dan psikologis, seperti perasaan marjinalisasi, ketidakpuasan terhadap pemerintah, dan pencarian identitas, menjadi alasan utama perekrutan anggota baru. Propaganda digital, khususnya melalui media sosial, digunakan secara masif untuk menarik perhatian calon rekrutan dari berbagai negara. Hasil kajian ini sangat berguna dalam memahami daya tarik Daesh bagi individu, tetapi peneliti tidak secara langsung membahas Daesh sebagai *norm entrepreneur* dalam struktur internasional.

²² Katarzyna Jasko et al., "ISIS: Its History, Ideology, and Psychology," *Handbook of Contemporary Islam and Muslim Lives* (2018): 1089–1113, https://doi.org/10.1007/978-3-030-32626-5_30.

Amer Ababakr dalam artikel *The Reasons Behind the Rise of ISIS: An Analytical Perspective* menjelaskan bahwa kemunculan Daesh tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari dinamika geopolitik yang kompleks. Invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 menjadi salah satu pemicu utama, menyebabkan runtuhnya pemerintahan Saddam Hussein dan menciptakan kekosongan kekuasaan. Situasi ini diperparah oleh kebijakan de-Ba'athifikasi, yang memecat banyak pejabat militer dan pegawai pemerintahan dari kalangan Sunni, mendorong untuk bergabung dengan kelompok-kelompok ekstremis.²³

Salah satu faktor kunci yang dibahas oleh Ababakr adalah konflik antar keyakinan (sektarian) antara Sunni dan Syiah. Kebijakan pemerintah Irak yang dipimpin oleh kelompok Syiah menyebabkan ketidakpuasan di kalangan Sunni, yang kemudian dimanfaatkan oleh Daesh untuk mendapatkan dukungan. Konflik di Suriah, yang juga memiliki dimensi sektarian, memperburuk situasi dan memberikan Daesh kesempatan untuk memperluas wilayahnya.

Ababakr menelusuri bagaimana Daesh menggunakan strategi propaganda canggih untuk menarik simpatian dari seluruh dunia. Daesh berhasil mengeksploitasi media sosial dan platform daring untuk menyebarkan ideologinya dan merekrut anggota. Daesh menggunakan narasi Kekhalifahan, jihad global, serta ketidakpuasan terhadap pemerintah lokal sebagai alat propaganda utama.

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu pemicu radikalisasi. Pengangguran, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan di beberapa wilayah membuat banyak individu rentan terhadap propaganda Daesh. Ababakr

²³ Ababakr, Amer. "The Reasons behind the Rise of Isis: An Analytical Perspective." *Mediterranean Journal of Social Sciences* 13, no. 5 (September 2, 2022): 12–27.

menekankan bahwa banyak pejuang asing yang bergabung dengan Daesh tertarik bukan hanya oleh ideologi, tetapi juga oleh janji ekonomi dan sosial yang ditawarkan kelompok tersebut.

Literatur selanjutnya yang diulas pada studi pustaka ini adalah artikel yang ditulis oleh Keiko Sakai, yang berjudul *ISIS and Sectarianism as a Result of a Meltdown of the Regional Orders in the Middle East*. Sakai membahas bagaimana kemunculan Daesh dan meningkatnya sektarianisme merupakan konsekuensi dari runtuhnya tatanan regional di Timur Tengah. Studi ini melihat faktor historis, politik, dan sosial yang berkontribusi terhadap fenomena tersebut.²⁴

Sakai menguraikan bahwa Daesh muncul di tengah ketidakstabilan politik yang dipicu oleh intervensi asing dan konflik internal di negara-negara seperti Irak dan Suriah. Invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 dan kebijakan de-Ba'athifikasi menciptakan kekosongan kekuasaan yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremis. Rezim otoriter yang runtuh menyebabkan fragmentasi kekuasaan, memungkinkan Daesh untuk berkembang dengan cepat.

Sektarianisme bukanlah penyebab utama munculnya Daesh, melainkan sebuah alat politik yang dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Ketegangan Sunni-Syiah diperburuk oleh intervensi kekuatan regional seperti Iran dan Arab Saudi, yang mendukung kelompok-kelompok berbeda dalam konflik ini. Daesh menggunakan retorika sektarian untuk menarik dukungan dari kelompok

²⁴ Keiko Sakai, "ISIS and Sectarianism as a Result of a Meltdown of the Regional Orders in the Middle East," *International Relations and Diplomacy* 3, no. 4 (April 28, 2015): 265–278, <https://doi.org/10.17265/2328-2134/2015.04.002>.

Sunni yang merasa terpinggirkan oleh pemerintah Syiah di Irak dan rezim Assad di Suriah.

Sakai menjelaskan bahwa tatanan politik di Timur Tengah mengalami kehancuran akibat perang saudara dan negara-negara tidak mampu untuk menjaga stabilitas domestik. Akibatnya, kelompok-kelompok non-negara seperti Daesh mengambil alih kendali di beberapa wilayah. Pergeseran kekuatan ini mengakibatkan meningkatnya perpecahan politik dan militer, serta mempersulit upaya untuk mencapai solusi damai.

Sakai ini juga membahas bagaimana aktor-aktor internasional, seperti AS, Rusia, dan negara-negara Eropa, memiliki peran dalam membentuk dinamika konflik di Timur Tengah. Intervensi militer, dukungan terhadap kelompok-kelompok tertentu, serta kebijakan luar negeri yang tidak konsisten memperburuk situasi. Sementara itu, kekuatan regional seperti Turki, Iran, dan negara-negara Teluk memanfaatkan krisis ini untuk memperkuat pengaruh.²⁵

Literatur ini menyimpulkan bahwa munculnya Daesh dan meningkatnya sektarianisme adalah hasil dari kombinasi faktor struktural, termasuk intervensi asing, kebijakan represif pemerintah, serta kegagalan negara dalam membangun stabilitas. Literatur ini telah menjelaskan mengenai bagaimana struktur yang ada membentuk agen. Namun, Sakai tidak secara langsung membahas bagaimana Daesh sebagai agen berupaya membentuk norma global.

²⁵ Keiko Sakai, *ISIS and Sectarianism as a Result of a Meltdown of the Regional Orders in the Middle East*.

Dalam *The ISIS Model and its Influence Over Global Terrorism*, Mahmut Cengiz, Kutluer Karademir, dan Huseyin Cinoglu. membahas bagaimana Daesh berkembang menjadi organisasi teroris transnasional dengan model organisasi yang unik. Daesh menggabungkan struktur negara dengan elemen kelompok teroris, menciptakan penyatuan yang lebih efektif dalam perekrutan, pendanaan, dan operasi militer. Struktur hierarkisnya memungkinkan kontrol yang ketat terhadap wilayah yang dikuasainya, sementara jaringannya mendukung operasi global.²⁶

Cengiz dkk. menjelaskan bagaimana Daesh menggunakan media sosial dan propaganda digital untuk menarik anggota dari berbagai latar belakang. Cengiz dkk. mengidentifikasi bahwa Daesh memanfaatkan narasi Kekhalifahan, ketidakpuasan sosial, serta identitas agama untuk menarik simpatisan dari luar Timur Tengah. Proses radikalisis dilakukan melalui komunitas daring, video propaganda, serta komunikasi langsung melalui aplikasi pesan terenkripsi.

Salah satu aspek penting dalam model Daesh adalah sistem pendanaannya yang kompleks. Cengiz dkk. menjelaskan bahwa Daesh menggunakan berbagai metode pendanaan, termasuk penyelundupan minyak, pajak ilegal di wilayah yang dikuasai, serta donasi dari jaringan simpatisan global. Pendekatan ekonomi ini memungkinkan Daesh untuk mendanai operasi militer dan propaganda dalam skala besar.

Cengiz et al. juga mengkaji bagaimana model Daesh menjadi inspirasi bagi kelompok teroris lain di berbagai negara. Strategi dalam menggunakan *sleeper*

²⁶ Mahmut Cengiz, Kutluer Karademir, and Huseyin Cinoglu, *The ISIS Model and Its Influence Over Global Terrorism*.

cells, lone-wolf attacks, dan propaganda daring telah diadopsi oleh banyak organisasi teroris di luar Timur Tengah. Daesh juga berhasil membentuk afiliasi di berbagai wilayah, termasuk Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa.

Cengiz et al. menerangkan berbagai langkah yang telah diambil oleh komunitas internasional untuk melemahkan Daesh. Upaya tersebut mencakup operasi militer oleh koalisi internasional, pemblokiran keuangan, serta strategi kontra-propaganda untuk melawan narasi ekstremis. Kerja sama global sangat penting dalam mencegah penyebaran ideologi dan model organisasi Daesh ke kelompok teroris lainnya.²⁷

Literatur ini menunjukkan bagaimana Daesh membangun model organisasi yang unik. Daesh telah memperluas pengaruhnya melalui propaganda dan perekrutan global, serta memengaruhi terhadap dinamika terorisme di dunia. Kendati secara tersirat telah menerangkan mengenai strategi *norm entrepreneurship* Daesh, namun peneliti tidak menggunakan konsep ini dalam tulisannya tersebut.

Dari berbagai literatur yang ditinjau, terlihat bahwa mayoritas penelitian tidak melihat fenomena Daesh dalam lensa *norm entrepreneur*. Meskipun ada pembahasan mengenai pengaruh Daesh terhadap aktor-aktor lain dalam ranah terorisme dan ekstremisme global, belum ada penelitian yang secara langsung melihat Daesh sebagai *norm entrepreneur*. Oleh karena itu, penelitian ini dapat

²⁷ Mahmut Cengiz, Kutluer Karademir, and Huseyin Cinoglu, *The ISIS Model and Its Influence Over Global Terrorism*.

mengisi kesenjangan tersebut dengan menguak bagaimana *Daesh* berupaya melakukan *norm entrepreneurship*.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Norma dan Dilema Norma

Finnemore dan Sikkink mengatakan bahwa “*There is general agreement on the definition of a norm as a standard of appropriate behavior for actors with a given identity.*” Kutipan tersebut menjelaskan bahwa norma merupakan standar atau aturan perilaku yang dianggap pantas dan sesuai bagi aktor-aktor yang memiliki identitas tertentu.²⁸ Norma berfungsi sebagai pedoman yang menentukan bagaimana suatu aktor, seperti negara, organisasi, atau individu, seharusnya bertindak berdasarkan identitas atau karakteristik yang dimiliki.

Namun ada perdebatan mengenai dilema moral dalam norma. Finnemore pada tahun 1996 menegaskan bahwa tidak ada norma sosial yang secara otomatis dapat dianggap “baik”.²⁹ Norma selalu bergantung pada konteks dan sudut pandang tertentu serta menjadi topik perdebatan akibat perbedaan nilai dalam kehidupan bersama. Pada tahun 1998, Finnemore dan Sikkink mempertegas bahwa norma sosial selalu dianggap benar oleh para pendukungnya, meskipun mungkin dipandang buruk oleh pihak lain. Finnemore dan Sikkink mencontohkan bagaimana norma seperti perbudakan dan rasisme pernah diterima dalam masyarakat.³⁰

²⁸ Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, “International Norm Dynamics and Political Change,” *International Organization* 52, no. 4 (1998): 892, <https://doi.org/10.1162/002081898550789>.

²⁹ Martha Finnemore, *National Interests in International Society* (Ithaca, NY: Cornell Univ. Press, 1996). dikutip dari Wunderlich, Carmen. “Dedicated to the Good: Norm Entrepreneurs in International Relations.” Essay. In *Rogue States as Norm Entrepreneurs Black Sheep or Sheep in Wolves’ Clothing?*, 42. Cham: Springer, 2020.

³⁰ Martha Finnemore, and Kathryn Sikkink. *International Norm Dynamics and Political Change*. Hal. 892

Namun, norma tidak bersifat mutlak, karena dapat berubah seiring waktu dengan perkembangan nilai, kesadaran sosial, dan pemikiran kritis yang membuat masyarakat menolak norma lama yang dianggap tidak relevan.

Klotz berpendapat bahwa tidak semua norma berhubungan dengan moral atau etika.³¹ Menurutnya, norma adalah aturan atau kebiasaan yang disepakati bersama untuk mengatur bagaimana orang seharusnya berperilaku. Namun, norma ini tidak selalu muncul karena pertimbangan tentang baik atau buruk secara moral. Kadang, norma hanya ada karena alasan praktis atau agar hidup bersama lebih tertata.

Keck dan Sikkink memberikan perbedaan pandangan terhadap keterlibatan aktivis internasional. Bagi sebagian pihak, hal ini dianggap sebagai upaya positif untuk mendorong perubahan, namun bagi pihak lain bisa dipandang sebagai bentuk “imperialisme budaya” yang memaksakan nilai suatu kelompok kepada kelompok lain. Keck dan Sikkink juga mempertanyakan apakah kampanye moral advokasi internasional benar-benar dilandasi niat murni untuk melindungi HAM atau sejenisnya atau sekedar strategi memaksakan kepentingan kelompok tertentu.³²

Nina Tannenwald menjelaskan bahwa norma ”baik” tidak selalu membawa dampak positif. Dengan norma *nuclear taboo*, dia menjelaskan mengenai pelarangan penggunaan senjata nuklir karena dampaknya yang menghancurkan dan

³¹ Audie Klotz, “Norms in International Relations Theory,” essay, in *Norms in International Relations: The Struggle against Apartheid* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1995), 14.

³² Margaret E. Keck and Kathryn A. Sikkink, “Historical Precursors to Modern Transnational Advocacy Networks,” essay, in *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1998), 39.

tidak bermoral. Namun, hal ini justru mendorong pengembangan senjata konvensional yang dianggap lebih aman, meskipun sama-sama senjata perang.³³

Krook dan True berpendapat bahwa norma merupakan sesuatu yang terus berkembang (*works-in-progress*), bukan sebagai aturan yang sudah selesai dan tidak bisa berubah.³⁴ Hal ini disebabkan oleh sifat dinamis norma yang memerlukan penyesuaian dengan perkembangan sosial, politik, maupun teknologi. Norma yang awalnya dianggap *final* bisa saja ditafsirkan ulang atau bahkan diperdebatkan karena adanya perubahan kondisi dunia.

Kendati tidak dapat ditentukan baik-tidaknya suatu norma, diskusi yang telah dilakukan oleh akademisi menunjukkan bahwa norma itu bersifat relatif, subjektif, dan dinamis. Norma bersifat demikian karena dipengaruhi oleh budaya, sejarah, serta situasi tertentu. Apa yang dianggap normal di suatu masyarakat bisa jadi dianggap aneh di masyarakat lain, bergantung pada pengalaman, keyakinan, dan posisi sosial seseorang. Norma juga dapat berubah seiring waktu, sehingga tidak ada aturan tunggal yang berlaku di berbagai tempat.

1.7.2 Norm Entrepreneur : dari *Feel-Good* ke *Unconventional*

Salah satu konsep penting dalam studi tentang norma dalam Hubungan Internasional adalah *norm entrepreneur*. *Norm entrepreneur* adalah individu atau kelompok yang giat mempromosikan, menyebarkan, dan melembagakan norma

³³ Nina Tannenwald, "The Nuclear Taboo: The United States and the Normative Basis of Nuclear Non-Use," *International Organization* 53, no. 3 (1999): 433–468, <https://doi.org/10.1162/002081899550959>. dikutip dari Wunderlich, Carmen. "Dedicated to the Good: Norm Entrepreneurs in International Relations." Essay. In *Rogue States as Norm Entrepreneurs Black Sheep or Sheep in Wolves' Clothing?*, 43. Cham: Springer, 2020.

³⁴ Mona Lena Krook and Jacqui True, "Rethinking the Life Cycles of International Norms: The United Nations and the Global Promotion of Gender Equality," *European Journal of International Relations* 18, no. 1 (November 18, 2010): 104, <https://doi.org/10.1177/1354066110380963>.

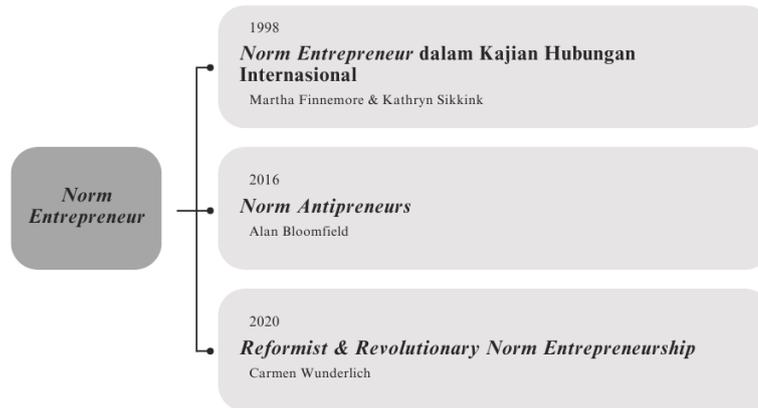
baru untuk mengubah perilaku dalam masyarakat. *Norm entrepreneur* berperan sebagai *problem solvers* dengan meyakinkan orang lain untuk melihat isu secara berbeda dan mengubah perilaku. *Norm entrepreneur* sering dikenal setelah berhasil menciptakan, menyebarkan, atau memperkuat norma tertentu, dengan pengakuan sosial diberikan oleh peneliti.³⁵

Sejarah konsep *norm entrepreneur* studi Hubungan Internasional telah berkembang seiring waktu. Pada tahun 1998, Finnemore dan Sikkink memperkenalkan konsep *norm entrepreneur* dalam kajian Hubungan Internasional. Finnemore dan Sikkink menjelaskan bahwa *norm entrepreneur* menggunakan bujukan, kampanye, dan diplomasi untuk mempengaruhi negara, institusi, atau opini publik. Contoh *norm entrepreneur* termasuk Henry Dunant (pendiri ICRC) dan Emmeline Pankhurst (pejuang hak asasi perempuan).³⁶ Konsep ini berkembang lebih lanjut pada tahun 2015 ketika Bloomfield memperkenalkan *norm antipreneurs*, pihak yang menentang perubahan norma internasional, dengan contoh Rusia dan Tiongkok yang menentang norma Responsibility to Protect (R2P).³⁷

³⁵ Annika Björkdahl. "Norms, Norm Entrepreneur, and Normative Structure." in *From Idea to Norm: Promoting Conflict Prevention* (Lund, Sweden: Lund University, 2002), 45.

³⁶ Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, *International Norm Dynamics and Political Change*, 895, 897.

³⁷ Alan Bloomfield, "Norm Antipreneurs and Theorising Resistance to Normative Change," *Review of International Studies* 42, no. 2 (September 21, 2015): 310–333, <https://doi.org/10.1017/s026021051500025x>.



Gambar 1. 1 Perkembangan Konsep *Norm Entrepreneur* dalam HI

Ciri khas *norm entrepreneur* adalah aktif dan konsisten antara ucapan dan tindakan. *Norm entrepreneur* tidak hanya menunggu perubahan, tetapi secara langsung mengambil inisiatif dan bertindak untuk menciptakan perubahan itu sendiri.³⁸ *Norm entrepreneur* juga berkomitmen dalam jangka panjang terhadap nilai atau norma yang diperjuangkan, meskipun cara yang digunakan bisa berubah sesuai situasi politik.

Wunderlich mengkritisi pandangan lama yang hanya menganggap suatu aktor sebagai *norm entrepreneur* jika berhasil membentuk atau menyebarkan norma baru. Menurutnya, penting juga untuk meneliti upaya-upaya yang masih dalam proses atau bahkan yang gagal, karena dari sana kita bisa memahami dinamika dan tantangan dalam penyebaran norma. Keberhasilan *norm entrepreneur* bisa dinilai dari beberapa tingkatan. Tingkat tertinggi adalah ketika norma tersebut ditulis secara resmi dalam dokumen seperti traktat atau deklarasi internasional. Tingkat menengah adalah ketika norma mendapat dukungan dalam bentuk pernyataan tertulis atau lisan dari negara lain. Sedangkan tingkat dasar adalah saat norma

³⁸ Richard Price, "Transnational Civil Society and Advocacy in World Politics," *World Politics* 55, no. 4 (July 2003): 579–606, <https://doi.org/10.1353/wp.2003.0024>.

berhasil masuk ke dalam agenda politik.³⁹ Jika norma tersebut sudah ada sebelumnya, keberhasilan bisa terlihat dari seberapa efektif aktor tersebut mempertahankannya atau memperkuatnya, misalnya melalui kritik terhadap pelanggaran, kampanye penyadaran, atau pengulangan makna norma di forum resmi.⁴⁰

Tabel 1. 1 Ciri Utama *Norm Entrepreneurship*

	Kategori	Penjelasan
Normative argumentation/speech act	<i>Framing (diagnostic, prognostic, motivational)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Normative/historical precedents - Analogies - Reference to universal principles or construction of “collective action frames” - Linkages to other policy fields/norms - Relationship to the existing normative order (affirmative/negative/destructive; new frame/alternative interpretation; counter-frame) - Dramatizing or emotional language - Vested interest versus common good
	<i>Naming / shaming / blaming</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Verbal criticism - Naming, shaming, and blaming - Stigmatization/demonization
Norm entrepreneurial practices and activities	Strategic coalition-building	<ul style="list-style-type: none"> - Cooperation or alliance with like-minded actors (states, IOs, committed individuals, media, civil society actors) - Recruiting support from civil society
	Symbolic actions	<ul style="list-style-type: none"> - Scandals - Protests - Symbolic norm deviation/civil disobedience
	Resources	<ul style="list-style-type: none"> - Financial means - Practical support (capacity building) - Brokerage/mediating services/community services

³⁹ Carmen Wunderlich. *Rogue States as Norm Entrepreneurs: Black Sheep or Sheep in Wolves' Clothing?*.

⁴⁰ Maria Rost Rublee, *Taking Stock of the Nuclear Nonproliferation Regime: Using Social Psychology to Understand Regime Effectiveness*.

	<ul style="list-style-type: none"> - Diplomacy - Provision of expertise and (technical and general) knowledge – Moral authority/reputation - Transparency
--	--

Sumber : Carmen Wunderlich, *Rogue States as Norm Entrepreneurs: Black Sheep or Sheep in Wolves' Clothing?* (Cham: Palgrave Macmillan, 2020), 90.

Norm entrepreneur sering digunakan untuk menyebut aktor-aktor yang menyebarkan norma liberal barat. Wunderlich menyebut penyematan seperti itu sebagai *prototypical norm entrepreneur* atau *feel-good norm entrepreneurship*. Sebaliknya, Wunderlich menggunakan istilah *unconventional* atau *unorthodox* untuk membedakan aktor-aktor *norm entrepreneur* yang diluar dari kerangka tersebut. Wunderlich juga membagi *norm entrepreneurship* menjadi dua jenis, reformis dan revolusioner.⁴¹

Tabel 1. 2 Perbedaan *Norm Entrepreneur* Reformis dan Revolusioner

Aspek	Reformis	Revolusioner
Posisi dalam sistem kekuasaan	<ul style="list-style-type: none"> - Terintegrasi dalam sistem - Diakui sebagai aktor politik 	<ul style="list-style-type: none"> - Bisa diterima atau ditolak - Tidak selalu diakui sebagai aktor politik
Tujuan utama	Mengubah sistem dengan cara memperbaiki atau mengembalikan norma yang sudah menyimpang ke makna aslinya	Menggulingkan sistem lama dan membangun sistem baru yang berbeda dari sistem yang ada
Arah tindakan	<ul style="list-style-type: none"> - Progresif untuk memperbaiki sistem - Restoratif untuk mengembalikan nilai asli 	<ul style="list-style-type: none"> - Subversif, bertujuan untuk melemahkan atau menggulingkan sistem
Cara/strategi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti aturan yang ada - Fokus pada persuasi dengan argumen yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Menolak atau melawan aturan yang ada - Menggunakan langkah-langkah ekstrem seperti

⁴¹ Carmen Wunderlich. *Rogue States as Norm Entrepreneurs: Black Sheep or Sheep in Wolves' Clothing?*, Hal. 266-271.

	kuat - Lebih banyak mediasi daripada menyalahkan - Bekerja sama dengan berbagai pihak (negara dan masyarakat sipil)	tekanan diplomatik, menyalahkan secara terang-terangan, dll. - Siap mengambil risiko yang merusak sistem - Kurang bekerja sama dengan masyarakat sipil
Cara kerja	- Bersedia kompromi, konstruktif	- Berpegang teguh pada prinsip (<i>absolute ethic</i>), cenderung radikal dan tidak fleksibel

Sumber : Carmen Wunderlich, *Rogue States as Norm Entrepreneurs: Black Sheep or Sheep in Wolves' Clothing?* (Cham: Palgrave Macmillan, 2020), 267.

Norm entrepreneur reformis mendukung tatanan norma yang ada dan berupaya memperbaikinya agar lebih efektif atau kembali ke makna aslinya, tanpa menggulingkan sistem yang ada. *Norm entrepreneur* reformis terlibat dalam pengambilan keputusan dan menggunakan bujukan serta kompromi dan kolaborasi untuk perubahan bertahap. Sebaliknya, *norm entrepreneur* revolusioner tidak puas dengan perubahan reformis dan berusaha menggulingkan tatanan yang ada untuk menciptakan sistem baru yang lebih adil. Pendekatan bersifat memaksa dan konfrontatif, termasuk menyalahkan dan merusak negosiasi. *Norm entrepreneur* revolusioner menolak kompromi karena yakin sedang memperjuangkan kebenaran yang mutlak.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Christopher Lamont, metode kualitatif adalah pendekatan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berfokus pada hal-

hal seperti tulisan, ucapan, gambar, atau bentuk komunikasi lainnya.⁴² Tujuannya adalah memahami peristiwa atau tindakan sosial secara mendalam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, metode deskriptif analisis berfungsi untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang objek yang diteliti berdasarkan data atau sampel yang telah dikumpulkan. Tujuan dari deskriptif analisis adalah untuk menggambarkan secara detail berbagai permasalahan, proses, serta hubungan antara subjek penelitian dengan fokus utama yang diteliti.⁴³

1.8.2 Batasan Penelitian

Untuk penelitian ini, peneliti menetapkan batasan penelitian pada komunitas Muslim dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Tahun 2014 dipilih sebagai awalan karena Daesh mendeklarasikan Kekhalifahan pada tahun tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya merupakan masa-masa puncak aktivitas Daesh, hingga tahun 2019 saat terbunuhnya Khalifah al-Baghdadi yang menandakan kekalahan Daesh.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok yaitu, Daesh sebagai aktor non-negara yang beroperasi lintas batas negara atau secara transnasional. Unit eksplanasi dalam penelitian ini merujuk pada fenomena atau proses yang ingin dijelaskan yaitu, aktivitas normatif Daesh, terutama penyebaran kewajiban berjihad

⁴² Christopher K. Lamont, *Research Methods in International Relations* (London: SAGE Publications Ltd, 2022).

⁴³ Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 244.

kepada komunitas Muslim di berbagai negara. Tingkat analisis yang digunakan adalah tingkat sistem internasional (*international/systemic level*), dengan memusatkan perhatian pada bagaimana Daesh sebagai aktor non-negara berinteraksi dengan komunitas Muslim internasional (*ummah*) dan terlibat dalam dinamika struktur global.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka adalah cara meneliti dengan mengumpulkan dan mempelajari informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel berita, dan laporan, tentang suatu topik tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami ide-ide dan tren yang sudah ada, menemukan hal-hal yang belum banyak diketahui, serta membantu fokus dalam penelitian berikutnya.

Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, artikel media, serta dokumen dan publikasi resmi dari Daesh, terutama majalah *Dabiq*, *Rumiyah*, transkrip pidato, dan publikasi lainnya. Selain itu, digunakan juga laporan lembaga *think tank*, badan internasional, serta literatur yang membahas mengenai topik terkait. Teknik ini dipilih untuk mendalami pembangunan narasi, struktur, dan strategi penyebaran nilai yang dilakukan oleh Daesh.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis akan difokuskan pada identifikasi dan interpretasi terhadap narasi-narasi normatif yang dibangun oleh Daesh, serta dikaji dalam kerangka teori

norm entrepreneur sebagaimana dikembangkan dalam literatur Hubungan Internasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana Daesh membingkai nilai tertentu sebagai norma, bagaimana norma tersebut disebarkan kepada komunitas Muslim, serta bagaimana struktur internasional memengaruhi proses tersebut.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, teknik analisis data hingga sistematika penulisan. Peneliti mengidentifikasi *gap* penelitian, sehingga dapat ditemukan urgensi penelitian ini.

BAB II SEJARAH DAN PROFIL DAESH

Bab ini menjelaskan bagaimana Daesh bisa muncul dan menjadi kuat. Daesh tumbuh karena situasi kacau setelah perang di Afghanistan, invasi Amerika ke Irak, dan konflik di Suriah. Dalam kekacauan itu, Daesh membentuk sistem pemerintahan sendiri yang mirip seperti negara, lengkap dengan aturan, wilayah, dan lembaga. Dalam bab ini, akan dijelaskan sejarah kemunculan, struktur organisasi, dan keyakinan yang Daesh miliki secara lengkap.

BAB III DAESH DI ARENA INTERNASIONAL

Bab ini menjelaskan bagaimana Daesh menargetkan umat Islam sebagai sasaran utama penyebaran normanya. Lewat media dan narasi penderitaan umat, Daesh mengajak Muslim untuk berjihad guna mencapai tujuan. Daesh juga

memanfaatkan isu identitas, ketidakadilan, dan marginalisasi untuk membentuk cara pandang umat secara global.

BAB IV DAESH SEBAGAI *NORM ENTREPRENEUR*

Bab ini akan menjawab pertanyaan penelitian mengenai kemungkinan Daesh sebagai *norm entrepreneur* meskipun tidak sesuai dengan kriteria *prototypical*. Pertanyaan ini dapat terjawab menggunakan konsep *norm entrepreneur* yang telah dipaparkan dalam bagian kerangka konseptual dengan melihat sepak terjang dan aktivitas Daesh.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyimpulkan secara keseluruhan hasil temuan penelitian. Bab ini juga akan memberi saran untuk pengembangan kajian dan penelitian di masa depan.

